

## DAFTAR RUJUKAN

- al-Anbari, Khalid Ali Muhammad, *Sistem Politik Islam Menurut Al-Quran Sunnah dan Pendapat Ulama Salaf*, terj. Mat Taib Pa et. dari *Fiqih al-Siyasah al-Syar'iyah Daw'I Al-Quran wa al-Sunnah wa Aqwal Salaf al-Ummah cet. 1*, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd, 2008.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*, terj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al Thabari, *Tarikh al Umam wa al Mulk*, Dar al Fikr: Bairut, 1987.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Assegaf, Syarifah Devi Isnaini, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2017.
- Bakrie, Syamsul, "Keberadaan Peraturan Daerah dan Permasalahannya", *Jurnal clavia* Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, vol. 5 no. 2, 2004.
- Basso, Anang, "Bantah Slintutan, Panitia Pembentukan BPD Mirigambar: Kami Sudah Sahkan" dalam <https://www.tulungagungtimes.com/baca/184203/20181211/111300/bantah-slintutan-panitia-pembentukan-bpd-mirigambar-kami-sudah-sahkan/> diakses 6 Juli 2019
- Barlian, Arsito Evandy A., "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", *Jurnal hukum Fiat Justisia* vol. 10 no. 4, Oktober-Desember 2016, hal. 590 dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/801/694> diakses pada 23 Juli 2019
- Chandra, Riawan, Kresno Budi Harsono, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: UAJY, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Panduan Produk Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia edisi ke-5, 2011.
- Djazuli, A., *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Frenki, "Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam", Lampung: Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Haryani, Dian, "Peran Badan Permusyawaratan Desa BPD. Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai", *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area, 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Kamaluddin, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru", *Skripsi*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Kamus Al-Munawir versi Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Khaleed, Badriyah, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Ma'rifad, Khusnul, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mu'in Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016.
- Nawawi, Imam, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin jilid 1*, terj. Musthofa Said Al-Khin. Dkk, tanpa kota: al-i'tishom, tanpa tahun.
- Nurhayati, Agustina, *Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. Ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Prakoso, Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Qutaibah, Ibnu, *Al Imamah wa As Siyasah*, Lebanon: Dar Al Kutub, 1992.

- Saebani ,Beni Ahmad, *Fiqih Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW, hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Saputra, Prayoga, “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.”, *Skripsi* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Setiawan, Bagus, “*Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia: Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, Skripsi Program Sarjana Syariah dan Hukum: Bandar Lampung, 2017.
- Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.